

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis indeks demokrasi Indonesia berdasarkan EIU (Economist Intelligence Unit) pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam perspektif etika politik John Stuart Mill dengan pendekatan utilitarianisme. Pendekatan tersebut dalam bentuk pemerintahan perwakilan Mill menggabungkan etika dan keadilan serta peran pemerintah dalam menjaga keteraturan dan mendorong kemajuan masyarakat. Studi ini menyoroti pentingnya melihat indeks demokrasi Indonesia dalam etika politik demokrasi berdasarkan kebebasan individu, pemerintahan perwakilan, pendidikan dan partisipasi, perlindungan hak-hak minoritas, diskusi dan debat terbuka, sehingga dapat menunjukkan bagaimana peningkatan dan penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan dapat menjadi standarisasi dalam memperbaiki masalah kompleks dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji implementasi prinsip utilitas Mill dalam demokrasi Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengacu pada sumber kepustakaan pada buku, jurnal, artikel penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni model masalah aktual dengan metode hermeneutika filosofis. Unsur metodis yang dipakai dalam analisis penelitian ini adalah interpretasi, analisis, kesinambungan historis, deskripsi, dan heuristik. Metode ini dipilih untuk mengetahui, menampilkan, dan mengungkapkan indeks demokrasi Indonesia berdasarkan *Economist Intelligence Unit* secara mendalam dan menyeluruh. Penyusunan penelitian ini bersifat kualitatif yang mana masalah aktual dikaji dengan menghasilkan evaluasi kritis yang sesuai dan menyajikan filsafat alternatif yang lebih lengkap dan sesuai.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam indeks demokrasi Indonesia berdasarkan EIU pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami fluktuasi dengan peningkatan di beberapa aspek seperti pluralisme dan fungsi pemerintahan, tetapi penurunan terutama dalam kebebasan sipil dan budaya politik. Masalah-masalah dalam proses demokratisasi di Indonesia, seperti kebebasan berekspresi yang dibatasi, peran militer yang masih kuat, politisasi agama, serta korupsi yang meluas menjadi faktor utama yang menurunkan kualitas demokrasi. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Mill yang menekankan kebebasan individu dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Pemerintahan perwakilan di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip Mill, namun tantangan seperti politik dinasti, politik uang, dan kurangnya pendidikan politik membatasi kualitas demokrasi. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas juga masih menjadi masalah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar etika demokrasi Mill.

Kata Kunci: Indeks Demokrasi, Economist Intelligence Unit, Etika Politik, John Stuart Mill

ABSTRACT

This study aims to critically evaluate Indonesia's democracy index based on the EIU (Economist Intelligence Unit) during the second term of President Joko Widodo's administration from the perspective of John Stuart Mill's political ethics, with a utilitarian approach. Mill's approach to representative government integrates ethics, justice, and the government's role in maintaining order and promoting societal progress. The study emphasizes the importance of examining Indonesia's democracy index through the lens of democratic political ethics, focusing on individual freedom, representative government, education and participation, protection of minority rights, and open discussion and debate. This perspective provides insights into the improvements and declines in the quality of Indonesia's democracy and can serve as a standard for addressing the complex issues within its democratic system. Additionally, the research explores the application of Mill's principle of utility in the context of Indonesia's democracy.

This research is a qualitative study that relies on library sources, including books, journals, and research articles. The approach used is the actual problem model with a philosophical hermeneutic method. The methodological elements employed in the analysis include interpretation, analysis, historical continuity, description, and heuristics. This method was chosen to explore and present an in-depth and comprehensive analysis of Indonesia's democracy index based on the Economist Intelligence Unit. The research adopts a qualitative approach to critically evaluate current issues, offering a suitable critique and proposing alternative philosophical perspectives that are more comprehensive and applicable.

The findings indicate that Indonesia's democracy index, as measured by the EIU during the second term of President Joko Widodo, has experienced fluctuations. There have been improvements in certain aspects, such as pluralism and government functioning, but significant declines in areas like civil liberties and political culture. Issues in Indonesia's democratization process, including restricted freedom of expression, the persistent influence of the military, the politicization of religion, and widespread corruption, are key factors that diminish the quality of democracy. These challenges contradict Mill's principles, which emphasize individual freedom and active participation in democracy. While representative governance in Indonesia aligns with Mill's principles to some extent, issues such as political dynasties, money politics, and the lack of political education limit the quality of democracy. Furthermore, the protection of minority rights remains a significant concern. These findings suggest that Indonesia's democracy has yet to fully meet Mill's ethical standards for democracy.

Keywords: Democracy Index, Economic Intelligence Unit, Political Ethics, John Stuart Mill.